GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 482 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
TAHUN 2025

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur dan untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan pengaturan dalam bentuk Peraturan Gubernur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur (Berita Daerah Proovinsi Banten Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor Nomor 188.34/062/OTDA tanggal 5 Januari 2021 perihal Implementasi Sistem Regulasi Peraturan Daerah Berbasis Elektronik (e-Perda);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 Desember 2024

Pj. GUBERNUR BANTEN,

A. DAMENTA

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 482 Tahun 2024
Tanggal : 23 Deember 2024

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
TAHUN 2025

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
1.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;	Januari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
			3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.		
2.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Provinsi Banten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;	Januari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
			3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.		
3.	Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Januari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
4.	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C	Dinas Kesehatan	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.	Januari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
5.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman	Dinas Kesehatan	Keputusan Menteri Kessehatan tentang Rumah Sakit Jejaring	Januari	perintah peraturan

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
	Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Perseorangan di Provinsi Banten		Pengampuan Pelayanan Stroke, Kanker, Gasthrohepatologi, Uronefrologi, Kesehatan Ibu dan Anak, Kardiovaskuler, Respirasi dan Tuberculosis, Diabetes Mellitus, Infeksi Emerging, Kesehatan Jiwa.		perundang-undangan yang lebih tinggi
6.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Banten	Dinas Kesehatan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD	Januari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
7.	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Banten	Dinas Kesehatan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD	Januari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
8.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Banten	Dinas Kesehatan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD	Januari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
9.	Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Banten	Dinas Kesehatan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD	Januari	perintah peraturan perundang-

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
					undangan yang lebih tinggi
10.	Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain.	Januari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
11.	Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Daerah Nomr 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Januari	Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
12.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Januari	kebutuhan untuk melaksanakan program Pemerintah Provinsi Banten
13.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor... Tahun... tentang Penanaman Modal	DPMPTSP	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Februari	Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
14.	Tata Cara Pengembangan Peternakan	Dinas Pertanian	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Hewan dan produk Hewan	Februari	Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
15.	Pedoman Penetapan Harga Dasar dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Wilayah Provinsi Banten	Dinas ESDM	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	Februari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
			2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan nilai Perolehan Air Tanah; 4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Tanah.		
16.	Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2025-2045	DPMPTSP	Peraturan Daerah Nomor .... Tahun 2025 tentang Penanaman Modal	Maret	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
17.	Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Provinsi Banten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peraturan Menteri LH dan Kehutanan Nomor 74 Tahun 2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Berbahaya dan Beracun	Maret	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
18.	Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor	Dinas Lingkungan	1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	Maret	perintah peraturan perundang-

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
		Hidup dan Kehutanan	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L.		undangan yang lebih tinggi
19.	Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara	Biro Organisasi dan RB	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Maret	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
20.	Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Khusus di Provinsi Banten	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Menteri Dalam Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	April	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
21.	Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Menteri Dalam Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	April	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
22.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Tangerang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Menteri Dalam Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	April	perintah peraturan perundang-

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
					undangan yang lebih tinggi
23.	Peninjauan Tarif Retribusi	Badan Pendapatan Daerah	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	April	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
24.	Penanganan Kemiskinan Melalui Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Administratif Pajak Kendaraan bermotor	Badan Pendapatan Daerah	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	April	kebutuhan untuk melaksanakan program Pemerintah Provinsi Banten

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
			3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanganan Kemiskinan di Provinsi Banten; 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.		
25.	Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	Badan Kepegawaian Daerah	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	April	kebutuhan untuk melaksanakan program Pemerintah Provinsi Banten
26.	Tata Cara Pemberian Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur	Biro Umum	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	April	kebutuhan untuk melaksanakan program Pemerintah Provinsi Banten
27.	Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2025-2026	DP3AKKB	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	April	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
28.	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2025 - 2029	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.	Mei	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
29.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Biro Organisasi dan RB	Peraturan Daerah tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Mei	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
30.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pegawai non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten	Dinas Kesehatan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD	Mei	kebutuhan untuk melaksanakan program Pemerintah Provinsi Banten
31.	Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040	Mei	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
32.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Mei	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
33.	Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pantai Selatan Terpadu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043	Mei	kebutuhan untuk melaksanakan program Pemerintah Provinsi Banten
34.	Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Bendungan Karian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043	Mei	kebutuhan untuk melaksanakan program Pemerintah Provinsi Banten
35.	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Menteri Dalam Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Juni	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
36.	Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Menteri Dalam Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Juni	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
37.	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Menteri Dalam Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Juni	perintah peraturan perundang-

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
					undangan yang lebih tinggi
38.	Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Juni	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
39.	Standar Harga Satuan Provinsi Banten	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Juni	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
40.	Standar Harga Satuan Barang/Jasa Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Juni	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
41.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana	Juni	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
			Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah		
42.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Juni	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
43.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan UPTD	Biro Organisasi dan RB	Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Juli	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
44.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah	Biro Organisasi dan RB	1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK; 3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.	Juli	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
45.	Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mikik Daerah; 2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang	Juli	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
			Pengelolaan Barang Milik Daerah.		
46.	Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Pelaksana Fungsional dan Jabatan Lainnya Aparatur Sipil Negara	Biro Organisasi dan RB	1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK; 3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.	Juli	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
47.	Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana	Juli	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
			Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.		
48.	Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Agustus	kebutuhan untuk melaksanakan program Pemerintah Provinsi Banten
49.	Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelengaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan,	Agustus	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
			dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; 3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelengaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; 4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perlindungan penyandang Disabilitas.		
50.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan	Agustus	perintah peraturan perundang-

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
			Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 5.		undangan yang lebih tinggi
51.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Agustus	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
52.	Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan Skala Provinsi Banten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;	Agustus	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
			3. Peraturan Menteri LHK Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah Secara Termal 4. Peraturan Menteri LHK Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah 5. Peraturan Menteri LHK Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2020 tentang Penanganan Abu Dasar dan Abu Terbang Hasil Pengolahan Sampah Secara Termal 6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Strategis Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga		

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
53.	Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Provinsi Banten Tahun 2025-2029	Dinas Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	September	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
54.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	Oktober	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
55.	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025 - 2029	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota	Oktober	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
56.	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025	Badan Pendapatan Daerah	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025.	Oktober	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
57.	Nilai Perolehan Air Permukaan	Badan Pendapatan Daerah	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang	Oktober	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
			Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.		
58.	Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal	Oktober	Penilaian MCP KPK
59.	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovesi Daerah; 2. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah.	November	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
60.	Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN; 3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN; 4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi ASN; 5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi PPPK.	November	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
61.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026	Desember	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	RENCANA PENYUSUNAN	KETERANGAN
62.	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Aset Daerah	Desember	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Pj. GUBERNUR BANTEN,

A. DAMENTA